

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pusat pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan tidak terjadi secara serentak. Berbagai kegiatan industri yang berada di pusat pertumbuhan menjadikan investasi dan sumber daya terkonsentrasi di wilayah tersebut. Terkonsentrasinya kegiatan industri menyebabkan pusat pertumbuhan menyerap sumber daya dari daerah sekitarnya (*hinterland*) atau yang umum disebut *backwash effect*. Selain *backwash effect*, pusat pertumbuhan juga dapat memberikan efek sebaran (*spread effect*) pertumbuhan ekonomi ke daerah tetangganya.

Pusat pertumbuhan setidaknya harus memiliki dua aspek, yaitu: memiliki performa ekonomi yang tinggi dan memberikan efek limpahan ke daerah sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pusat pertumbuhan di Provinsi Banten dan melihat pola limpahan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Dengan menggunakan Tipologi Klassen ditemukan bahwa Kota Cilegon adalah pusat pertumbuhan di awal periode amatan, yaitu tahun 2011. Pada tahun 2011, Kota Cilegon merupakan salah satu Kota dengan PDRB perkapita tertinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Banten. Sektor industri merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB Kota Cilegon, yaitu sebesar 69,90%. Hal ini sangatlah wajar, melihat banyak perusahaan industri yang berada di Kota Cilegon.

Hasil autokorelasi spasial lokal (LISA) pada tahun 2011 dan 2013, menunjukkan terdapat dua daerah yang signifikan berkorelasi spasial, yaitu Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan. Tahun 2011, Kabupaten Serang termasuk dalam tipe hubungan *low-low*. Artinya, Kabupaten Serang yang memiliki pendapatan daerah rendah juga dikelilingi oleh daerah sekitarnya yang memiliki pendapatan rendah pula. Kemudian pada tahun 2013, Kabupaten Serang memiliki tipe hubungan Kabupaten Serang dengan daerah sekitarnya berubah menjadi *high-low*. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa terjadi *spillover* dari Kota Cilegon ke Kabupaten Serang, artinya pendapatan daerah Kota Cilegon memberikan efek limpahan ke pendapatan Kabupaten Serang. Sehingga, pada tahun 2013 pendapatan daerah Kabupaten Serang menjadi *high*. Data BPS pada tahun 2011 ke 2013 juga menyatakan adanya peningkatan kenaikan pendapatan daerah Kabupaten Serang.

Kota Tangerang Selatan selalu signifikan memiliki tipe hubungan *low-high* dari tahun 2011 hingga 2017. Hal ini berarti bahwa terdapat kecenderungan daerah yang memiliki pendapatan rendah, memiliki tetangga yang pendapatan daerahnya tinggi. Jika dilihat pada LISA *cluster map* dari tahun ke tahun, Indeks Moran Lokal untuk daerah-daerah tetangga Kota Tangerang Selatan tidak signifikan, yang artinya daerah-daerah tetangga tersebut tidak berbeda satu dengan lainnya. Penulis memahami hal ini sebagai indikasi bahwa efek limpahan dari pusat pertumbuhan (Kota Cilegon) belum menjangkau hingga Kota Tangerang Selatan. Hal ini terkesan kontra-intuitif karena secara geografis, Kota Tangerang Selatan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, yang seharusnya juga dapat memberikan efek limpahan, sehingga pendapatan Kota Tangerang Selatan bisa menyamai daerah-daerah tetangganya. Menurut penulis, hal ini mungkin terjadi karena efek limpahan dari DKI Jakarta lebih banyak mengarah ke Kota Tangerang namun tidak ke Tangerang Selatan. Seiring berjalannya waktu hal ini dapat membuat Kota Tangerang maju jauh lebih cepat daripada Tangerang Selatan sehingga terdeteksi *low-high*.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pada tahun 2011, menurut hasil Tipologi Klassen dan Kuantil, pusat pertumbuhan Provinsi Banten berada di Kota Cilegon. Efek limpahan pertumbuhan ekonomi yang diberikan oleh Kota Cilegon dari tahun 2011 hingga 2017 cenderung ke arah bagian timur Banten, namun tidak menjangkau hingga Kota Tangerang Selatan.

5.2. Saran

Topik penelitian mengenai Pusat Pertumbuhan sering dilakukan dan memiliki beberapa cara untuk menentukan pusat pertumbuhan. Penelitian mengenai pusat pertumbuhan serta efek limpahan yang diberikan pusat pertumbuhan, masih belum sempurna karena adanya beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama, dalam penelitian ini penulis tidak melibatkan pembahasan tentang keterkaitan antar sektor di sebuah pusat pertumbuhan, seperti yang sebaiknya dilakukan sesuai pemaparan Richardson (1978: 164–165) dalam Wibisono dan Kuncoro (2016). Keterbatasan kedua, dalam penentuan pusat pertumbuhan penulis belum mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti fasilitas yang lengkap, aksesibilitas yang baik dan mempunyai jumlah penduduk yang besar seperti yang dikemukakan oleh Friedman (1966) dalam Setiadi (2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut penulis kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah adalah mempermudah adanya *spillover effect* ke wilayah *hinterland*, yaitu dengan mengoptimalkan aksesibilitas dan membangun infrastruktur yang memadai. Serta membentuk pusat pertumbuhan baru, terutama pada Banten bagian selatan. Hal ini dilakukan karena efek limpahan pertumbuhan hanya terjadi ke bagian timur dan bagian barat. Pada akhirnya pusat pertumbuhan baru diharapkan dapat memberikan efek limpahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, R. (2012). Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-9.
- BPS. (2012). *Banten Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2014). *Banten Dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Banten Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik 2016.
- BPS. (2018). *Banten Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik 2018.
- BPS. (2012). *Buku saku PDRB Provinsi Banten 2010-2011*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2014). *Buku saku PDRB Provinsi Banten 2012-2013*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Buku saku PDRB Provinsi Banten 2014-2015*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Buku saku PDRB Provinsi Banten 2016-2017*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Buku saku PDRB Provinsi Banten 2017-2018*. Badan Pusat Statistik .
- BPS. (2013). *Kabupaten Lebak dalam angka 2013*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2011). *Kabupaten Lebak dalam angka 2011*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Kabupaten Lebak dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Kabupaten Lebak dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2012). *Kabupaten Pandeglang dalam angka 2012*. Badan Pusat Statistik 2012.
- BPS. (2014). *Kabupaten Pandeglang dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Kabupaten Pandeglang dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik 2016.
- BPS. (2018). *Kabupaten Pandeglang dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik 2018.
- BPS. (2012). *Kabupaten Serang dalam angka 2012*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2014). *Kabupaten Serang dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Kabupaten Serang dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Kabupaten Serang dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2012). *Kabupaten Tangerang dalam angka 2012*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2014). *Kabupaten Tangerang dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik.

- BPS. (2016). *Kabupaten Tangerang dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Kabupaten Tangerang dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2013). *Kota Cilegon dalam angka 2013*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2014). *Kota Cilegon dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Kota Cilegon dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Kota Cilegon dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2013). *Kota Serang dalam angka 2013*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2014). *Kota Serang dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Kota Serang dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Kota Serang dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2012). *Kota Tangerang Selatan dalam angka 2012*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2014). *Kota Tangerang Selatan dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Kota Tangerang Selatan dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik .
- BPS. (2018). *Kota Tangerang Selatan dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2012). *Kota Tangerang dalam angka 2012*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2013). *Kota Tangerang dalam angka 2013*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2014). *Kota Tangerang dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Kota Tangerang dalam angka 2016*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Kota Tangerang dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik
- Dhyatmika, K. W., & Atmanti, H. D. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2), 1-8.
- Gallo, J. L., & Ertur, C. (2005). Exploratory spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe, 1980-1995. *The Regional Science Association International*, 82(2), 175-199.

- GeoDa. (2019, October 27). *Local spatial autocorrelation (1)*. Diambil kembali dari GeoDa an Introduction to Spatial Data Analysis: https://geodacenter.github.io/workbook/6a_local_auto/lab6a.html
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 41-66.
- Muta'ali, L. (2003). Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, 17(1), 33-51.
- Pasaribu, E., Priyarsono, D., Siregar, H., & Rustiadi, E. (2014). Dampak Spillover Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kalimantan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 225-238.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2019, 11 10). *Profil Banten*. Retrieved from Portal E-Government Provinsi Banten: <https://www.bantenprov.go.id/profil-provinsi/geografi>
- Pohan, H. M. (2019). *Mengenal Ekonometrika Spasial: Sebuah Kajian Literatur*. Unpar, Progran Sarjana Ekonomi Pembangunan. Bandung: LPPM.
- Pratiwi, M. C., & Kuncoro, M. (2016). Analisis Pusat Pertumbuhan dan Autokorelasi Spasial di Kalimantan: Studi Empiris di 55 Kabupaten/Kota, 2000-2012. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 81-104.
- Rahayu, E., & Santoso, B. (2014). Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Al Teknik Pomits*, 3(2), 290-295.
- Rohmah, N. S. (2018). Elit dan Pemekaran Daerah: Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 90-105.
- Saputro, R. D., Widyaningsih, P., Kurdi, N. A., & Susanti, A. (2018). *Proporsionalitas autokorelasi spasial dengan indeks global (Indeks Moran) dan indeks lokal (local indicators of spatial association (LISA))*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Pendidikan Matematika . Solo: Publikasi Ilmiah.
- Setiadi, H. (2009). *Konsep pusat-pinggiran: Sebuah tinjauan teoritis*. DKI Jakarta: KBP PW-Department Geografi FMIPA UI.

- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Ekombis Review*, 2(2), 197-209.
- Supartoyo, Y. H., Tatum, J., & Sendouw, R. H. (2013). The Economic Growth and The Regional Characteristic: The Case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 16(1), 4-19.
- Wibisono, P., & Kuncoro, M. (2015). Efek Limpahan Pertumbuhan Antar-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2013. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 31-45.
- Wibowo, T. (2012). Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 16(2), 23-49.
- Wuryandari, T., Hoyyi, A., Kusumawardani, D. S., & Rahmawati, D. (2014). Identifikasi Autokorelasi Spasial Pada Jumlah Pengangguran di Jawa Tengah Menggunakan Indeks Moran. *Media Statistika*, 7(1), 1-10.